

PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh : Beni Wandagu

Beni Wandagau, 2015. Role of village head in community empowerment. Case of empowering community of Karangturi Village Gondangrejo Sub District Karanganyar Regency. Slamet Riyadi University, Thesis, unpublished.

This research aimed to describe the role of village head in empowering the community of Karangturi Village in Gondangrejo Sub District of Karanganyar Regency. The research method employed descriptive qualitative. the techniques of collecting data used observation, interview and documentation. The sampling technique employed purposive sampling. Data validation was carried out using data triangulation. The technique of analyzing data used interactive analysis model. Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. 1) The role of village head in community empowerment included a) The role of village head in building construction sector by reviving the mutual cooperation spirit among the members of society, and in religious activity by means of celebrating religious holiday and conducting monthly routine *pengajian*. The role of head village in building construction sector was also undertaken through village administrative building activity, in which the village head routinely examine the village financial administration in the objective of minimizing deviation and making the expense consistent with what specified in village budget and then reporting it to the BPD (Village Representative Assembly). Village economic sector development was also conducted by means of utilizing and managing the agricultural potential. The head village also gave the private the opportunity of developing the village's potency in order to improve the village economy. b) The role of village head in coordinating development. The role of village head in coordinating the development, in which the village head always coordinated with the village apparatus in conducting every activity. In addition to making coordination with his/her subordinate, the village head always coordinated with his/her superior like *camat* (head of sub district) and local government. The head of village always invited the members of society to discuss either formally or informally. He/she did it to stimulate the villagers to participate actively in development process. The role of government, particularly head of village, was as the facilitator of development. The head of village never discriminated his/her people. So that, no jealousy occurred among the members of society leading to social conflict. 2) The factors inhibiting the governmental organizational development in Karangturi Village of Gondangrejo Sub District of Karanganyar Regency included: internal and external factors. The internal factor consisted of human resource aspect in this case the poor quality and quantity of executive apparatus, inadequate work infrastructure, low quality of human resource (the apparatuses of village government graduated from Senior High School only, on the average), limited fund and the head of village's attitude seeming to put

others' interest superior to village development project. The external factor included the public participation in complying with the Village rule, and inter-status relationship.

Keywords: Village Head's role, community empowerment building construction sector economic sector development.

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu

pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Salah satu sasaran pokok pembangunan Desa ialah memberantas atau setidaknya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kiranya cukup disadari bahwa tidak jarang terjadi, hasil pembangunan desa hanya dinikmati oleh sekelompok elite desa atau bahkan oleh orang-orang di luar lingkungan desa.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi khususnya pada zaman otonomi daerah semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan

masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan.

Pendekatan *top-down* tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: 1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. 2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. 3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. 4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Masyarakat yang dinamis telah berkembang dalam berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangannya, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat. Aparatur pemerintah yang berada ditengah-tengah masyarakat dinamis tersebut tidak dapat tinggal diam, tetapi harus mampu memberikan berbagai pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia, khususnya di beberapa kabupaten, menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan struktur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar berkewajiban meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahannya di berbagai bidang, antara lain peningkatan kemampuan SDM seperti keahlian, pengetahuan dan ketrampilan dengan melalui pendidikan, pelatihan, kursus, magang, seminar/diskusi dan lain-lain.

Pemerintahan Kabupaten Karanganyar dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas SDM, sudah melaksanakan pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis Pemerintahan Desa sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2001 tentang peningkatan aparatur pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Harapan dari terlaksananya program pendidikan dan pelatihan tersebut adalah dapat meningkatkan kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah di desa.

Pada dasarnya kinerja pemerintah desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Kabupaten Karanganyar tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping faktor motivasi juga faktor pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desanya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: 1).Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak

menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. 2).Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. 3).Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. 4).Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya adalah kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pembangunan non fisik. Dalam kegiatan pembangunan fisik bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti bersama-sama yang dilakukan setiap bulan sekali pada minggu keempat.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dengan pengamatan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip resmi yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data tanpa mengabaikan kelebihan dan kekurangannya. Pengumpulan data dalam yang dimaksud adalah Observasi, Wawancara, Penelusuran data online.

Data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya akan dianalisa untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memecahkan persoalan yang ada. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model analisis interaktif (model saling terjalin).

Dalam model analisis interaktif, tiga komponen yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus.

Untuk pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan/fakta. itu peneliti menggunakan cara triangulasi data. Menurut Moleong (2002: 178), triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengecek (cross check) kebenaran data tersebut dengan cara membandingkannya dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang lain. Dengan kata lain akan dikontrol oleh data yang sama namun dengan sumber yang berbeda.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi metode dimana peneliti membandingkan temuan data yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, (misalnya catatan lapangan yang dibuat selama melakukan observasi) dengan data yang diperoleh dengan menggunakan metode lain (misalnya transkrip dari in-depth-interview). (Pawito, 2007: 99).

Hasil Penelitian

Desa Karangturi adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Karangturi adalah ± 10 Km². Desa Karangturi terbagi atas 10 Dusun yakni Dusun Pule, Dusun Cekel, Dusun Karanglo, Dusun Gunung Kendil, Dusun Sutan, Dusun Bison, Dusun Kopen, Dusun Kepuh, Dusun Kedungbarung, dan Dusun Karanganyar. Adapun orbitrasi atau jarak jalan antara Desa Karangturi dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten, jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat yakni 10 Km dengan lama tempuh 45 menit, sedangkan jarak ke Ibu Kota kabupaten terdekat yakni 15 Km yang dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi darat. Masyarakat di Desa Karangturi menggunakan alat transportasi darat untuk menghubungkan dengan pusat pemerintahan dan beberapa desa terdekat dengan menggunakan Motor.

Keadaan Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam penunjang pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam kemasyarakatan di desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Desa Tahun 2012, menunjukkan bahwa Jumlah

Penduduk Desa Karangturi pada tahun 2012 adalah 2.822 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 467 KK. Berdasarkan jumlah penduduk juga berdasarkan gender, yakni laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan monografi Desa Karangturi tahun 2013 tercatat bahwa jumlah penduduk Desa Karangturi sebesar 2.822 orang dan hampir sebagian diantaranya pernah mengikuti pendidikan formal Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi, baik itu tamat maupun tidak tamat. Hasil data yang diperoleh memperlihatkan berapa banyak masyarakat yang memiliki pendidikan wajib belajar 9 tahun, seberapa besar minat masyarakat di dalam menempuh pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang berhak diperoleh masyarakat setidaknya hingga jenjang Sekolah Menengah Atas.

Peranan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Di Desa Karangturi terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda merupakan program utama kepala desa. Hal ini dikarenakan 2560 penduduk Desa Karangturi berada pada usia 6-35 tahun. Dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai petani dan buruh bangunan. Dan sebahagian besar penduduk desa melakukan pernikahan dini dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1029 kepala keluarga. Hampir 80% penduduk Desa Karangturi bermata pencaharian sebagai petani. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah desa adalah lahan pertanian. Dengan luas wilayah pertanian yang berjumlah 127,47 m².

Sebahagian besar program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sumber pembiayaannya berasal dari APBN melalui PNPM. Baik itu yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik. Pemberdayaan masyarakat di desa ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembuatan drainase, pengerasan jalan peving blok, pembuatan jalan tani, perbaikan saluran irigasi persawahan dan pemberdayaan masyarakat non-fisik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita serta pembinaan generasi muda.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Karangturi sebahagian besar berasal dari PNPM baik itu berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Program pemberdayaan masyarakat yang bersifat pembangunan non fisik antara lain pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Pembinaan generasi muda di Desa Karangturi dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan dan pendekatan dari sisi ekonomi. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara melakukan pengajian rutin setiap bulan. Memperingati hari-hari besar keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindakan asusila, dan lain sebagainya.

Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Memberikan penyuluhan pertanian kepada petani muda di Desa Karangturi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Kelompok PNPM yang ada di Desa Karangturi, Bapak Pujiyanto (wawancara 1 April 2014, pukul 16.48 WIB) mengatakan:

“Untuk program pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-fisik, PNPM memiliki program yang namanya SPP atau simpan pinjam yang diberikan kepada warga

desa yang bersifat pinjaman modal dengan bunga yang hanya sebesar 1½ % dari jumlah pinjaman. Pemberian pinjaman dilakukan dengan cara berkelompok. Di desa ini jumlah kelompok yang ada sebanyak 15 kelompok. Dimana setiap kelompok terdiri atas 15 sampai 20 orang dan setiap kelompok diberikan pinjaman sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Yang pengembaliannya maksimal hingga 12 bulan beserta jumlah bunga 1½ %. Dimana 1% diberikan untuk UPK kecamatan, dan ½ % untuk UPK kelompok. Pinjaman modal ini diberikan kepada warga desa yang tidak mampu dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Baik itu untuk pengembangan berwiraswasta maupun pengembangan pertanian”.

Pemberian pinjaman modal ini sangat membantu warga masyarakat, khususnya petani muda yang ada di desa ini untuk lebih mengembangkan usahanya dalam pertanian. Selain untuk pengembangan usaha pertanian, SPP PNPM juga membantu warga desa yang ingin berwiraswasta. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang wiraswasta muda yang ada di desa ini, Kasmawati. Kasmawati membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. (wawancara tanggal, 2 April 2014, pukul 10.55 WIB) mengatakan:

“Saya salah satu anggota kelompok SPP PNPM yang ada di Dusun Pule. Saya cuman lulusan SMP mau cari kerja di Solo luar biasa susahny kalau hanya modal ijazah SMP. Setelah ikut pelatihan wiraswasta di kecamatan, saya tertarik untuk berwiraswasta. Saya diberi pinjaman 1,2 juta buat mengembangkan usaha saya. Saya pinjam uang untuk membuat counter pulsa. Karena di Karangturi belum ada orang yang jualan pulsa. Jadi saya coba-coba berjualan pulsa tapi karena modal saya kecil waktu itu, usaha ini tidak berjalan lancar. Makanya saya pinjam uang buat dijadikan modal di PNPM, sekarang alhamdulillah usaha jualan pulsa saya semakin berkembang. Sekarang saya tidak berjualan pulsa saja, tapi juga menjual hp dan chip M-Kios”.

Selain program SPP dari PNPM, program pembinaan generasi muda yang ada di desa ini juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian bagi warga desa. Penyuluhan pertanian ini diberikan oleh Dinas Pertanian dan Holtikultura melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di desa ini. Penyuluhan pertanian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kreatifitas petani mengenai potensi diri dan

lingkungan, meningkatkan nilai usaha tambah tani, meningkatkan kemandirian petani dan kelompok tani.

Setiap musim tanam baik itu rendangan maupun gaduh, Gapoktan selalu mengadakan LL (Laboratorium Lapangan) dan SLPTH (Sekolah Lapang Pengendalian Terpadu) yang sifatnya mengadakan kegiatan berhubungan dengan hambur benih, pengendalian hama, dan pemupukan berimbang. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dusun Pule Desa Karangturi, Bapak Agus Purnomo (wawancara, tanggal 1 April 2014, pukul 14.25 WIB) mengatakan :

“Gapoktan memiliki program-program kegiatan guna memberdayakan kelompok tani yang ada di Desa Karangturi. Mengingat besarnya potensi pertanian yang dimiliki desa ini. Gapoktan juga selalu ikut serta dalam penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Pertanian baik itu Dinas Pertanian daerah kabupaten, maupun dinas pertanian provinsi. Kita juga sering mengadakan diskusi terbuka dengan warga desa mengenai masalah yang dihadapi petani. Tak jarang kita juga mengundang penyuluh dari dinas pertanian dan hortikultura dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi petani. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa yang banyak merugikan petani setiap musimnya adalah hama penggerek batang dan tikus. Sehingga Gapoktan selalu berkoordinasi dan mengumpulkan anggota-anggota kelompok sebagai salah satu usaha dalam memberdayakan petani”.

Selain penyuluhan pertanian, warga desa juga mendapatkan bantuan bibit unggul dan pupuk murah dari dinas pertanian. Bibit unggul ini diperoleh dengan cara mengajukan proposal bantuan bibit dan pupuk ke dinas pertanian. Sehingga desa ini memperoleh bantuan bibit dari dinas instansi terkait. Namun sangat disayangkan, tidak semua warga desa merasakan bibit unggul ini. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah bibit yang ada. Sehingga penyaluran bibit unggul ini hanya dirasakan orang-orang tertentu saja di desa ini. Hanya ketua kelompok tani tertentu saja yang merasakan bibit unggul ini.

Selain pembinaan generasi muda, salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Karangturi adalah perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Perbaikan gizi ibu hamil dan balita menjadi salah satu program utama kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Karena generasi penerus adalah modal utama

dalam pembangunan. Untuk mendapatkan generasi muda yang berkualitas maka perlu dipersiapkan sedini mungkin, sejak anak masih dalam kandungan.

Program perbaikan gizi ibu hamil dan balita juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk memperbaiki gizi anak, agar anak-anak tidak rentan akan penyakit. Selain itu untuk memperkuat peran ibu dalam keluarga. Kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan anak dilakukan antara lain dengan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang dilakukan tiap dua kali dalam sebulan. Makanan tambahan yang dimaksud adalah bubur sehat bagi balita yang berumur 8 bulan hingga 3 tahun. Selain itu diberikan pula susu gratis bagi ibu hamil guna meningkatkan gizi pada ibu hamil. Selain itu diberikan pula makanan tambahan berupa biskuit susu sumbangan dari pemerintah kepada anak-anak sekolah dasar SD Negeri Karangturi 1 dan 2, dengan jumlah siswa keseluruhan kurang lebih 150 anak.

Penimbangan rutin juga dilakukan setiap dua kali dalam sebulan di lima posyandu yang ada di tiap dusun. Selain itu, pemberian penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dilakukan hampir disetiap bulannya. Yang dilakukan di aula desa, di mesjid, dan di pustu yang ada di tiap-tiap dusun. Selain penyuluhan tentang pentingnya kebersihan, penyuluhan tentang gizi dan makanan sehat juga sering diadakan. Penyuluhan ini diberikan oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan bidan desa.

Berkat adanya program perbaikan gizi ibu dan anak ini dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. Namun, terbatasnya jumlah dana dari pemerintah sehingga program ini masih belum maksimal. Masih banyak anak-anak yang membutuhkan gizi tambahan. Selain itu penyuluhan yang dilakukan belum menyentuh dikalangan terpencil seperti daerah Kampung Beru. Warga di kampung ini masih belum menyadari betul pentingnya kebersihan lingkungan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga di kampung ini yang belum memiliki MCK sendiri setiap rumah. Hanya beberapa rumah saja yang memiliki MCK. Sehingga penduduk di wilayah ini sering mengalami penyakit disentri, TBC, dan penyakit lainnya. Selain itu, penduduk di desa ini masih lebih suka ke dukun dibandingkan ke puskesmas untuk berobat. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang dokter dan rumah sakit bagi penduduk yang

kebanyakan manula. Mereka masih menganggap rumah sakit dan dokter adalah hal yang mewah dan tidak menjangkau ekonomi mereka.

Sedangkan Kepala Desa Karangturi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Karangturi memiliki peranan yang sangat sentral. Baik itu dalam pembangunan fisik desa maupun pembangunan non fisik yang ada. Kepala Desa berperan aktif dalam membangun desanya. Kepala desa senantiasa mengajak warganya bergotong royong dalam membangun desa. Bahkan tak jarang kepala desa terjun langsung mengawasi dan ikut dalam pembangunan fisik yang dilakukan di desanya.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat. Kepala desa senantiasa mengajak dan melakukan pembinaan kepada generasi muda. Kepala desa juga turut aktif dalam setiap kegiatan organisasi pemuda yang ada di desa ini. Seperti, kepala desa turut aktif dalam setiap rapat-rapat yang diadakan baik itu yang diadakan oleh kelompok tani maupun yang diadakan oleh kelompok SPP PNPM. Kepala desa selalu memberikan masukan dan saran serta pengarahan.

Kepala desa juga selalu mengajak warganya untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan, juga kegiatan keagamaan lainnya. Kepala desa juga selalu memberikan pengarahan kepada warganya agar senantiasa memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bahkan kepala desa juga turut aktif dalam gotongroyong membersihkan lingkungan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Bapak Kepala Desa Karangturi benar-benar telah melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Diantara lain; meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kepala desa dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala desa juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa baik dari pemerintah

maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan.

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Karangturi dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sebagai berikut.

Faktor-Faktor Pendorong & Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan organisasi pemerintah Desa Karangturi. Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat internal atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau bersumber dari luar organisasi.

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap pengembangan organisasi pemerintah khususnya di Desa Karangturi karena SDMnya kurang terampil seperti halnya penjelasan mengenai aspek sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada organisasi kantor tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Desa Karangturi masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan Desa, seperti tugas penataan pertamanan, kebersihan Desa, keindahan Desa dan lain-lain. Selain aspek dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat dalam organisasi pemerintah Desa Karangturi adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan. Kualitas aparat yang ditugaskan pada badan pengelolaan organisasi tersebut dari segi kemampuan kerja masih terlihat kurang.

Faktor prasarana kerja yang juga menjadi faktor penghambat efektifnya pelaksanaan pengembangan organisasi misalnya masih terbatasnya kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh petugas khususnya yang membawahi bagian administrasi misalnya saja dalam mengantar surat penting di kantor-kantor. Faktor dana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi, baik digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan secara administratif maupun untuk operasional tugas organisasi itu sendiri. Penggunaan dana khususnya bagi aparat meliputi tujuan antara lain untuk pemberian insentif, hal ini menjadi penting sebagai alat motivasi supaya petugas dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Ketersediaan dana khususnya dana rutin (ADD) yang dialokasikan bagi Kantor Desa masih minim jika dibandingkan beban tugas yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Pemerintahan Bapak Juwarno, salah satu faktor yang juga menghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Karangturi adalah sikap pemerintah desa yang terkadang lebih memilih orang lain dalam setiap proyek seperti perbaikan jalan. "Kami semua tahu kalau Kepala desa memiliki kemampuan yang sangat besar dalam memberdayakan masyarakat, tetapi beliau juga memiliki titik lemah yaitu terkadang memilih orang lain dalam pengerjaan sebuah proyek yang seharusnya dikerjakan oleh LKD, mungkin yang dilakukannya didasari oleh pertimbangan lain"(24 April 2014).

Aspek yang bersifat eksternal dalam hal ini adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi meliputi partisipasi masyarakat mentaati aturan dalam organisasi, dan hubungan antar status. Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memperoleh atau melaksanakan pembangunan. Namun hal tersebut yang kurang terlihat adalah masyarakat di kawasan, masih rendah partisipasinya dalam memperoleh tujuan organisasi. Sehingga hal ini kadangkala terjadi setelah mendapat teguran dari aparat, hal itu bukan karena masyarakat tidak mau mengurus organisasi atau sengaja melanggar tetapi lebih banyak mereka tidak tahu mengenai pengelolaan organisasi. Hal itu tidak lain karena sosialisasi aturan ini bagi masyarakat tersebut masih kurang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi.

Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah. Susunan status dalam satu kelompok dalam organisasi selalu tampil dalam 2 wujud yaitu berupa status formal dan status sosial. Status formal adalah berkaitan dengan jenjang atau hierarki yang ada dalam kelompok atau organisasi yang berkaitan langsung dengan rantai komando. Status sosial tidak selalu berkaitan dengan status formal seseorang, walaupun dapat saja seseorang yang mempunyai status formal yang tinggi dapat pula mempunyai status sosial yang tinggi.

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar meliputi: Kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), Sistem terbuka pada lapisan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, Adanya orientasi ke masa depan.

Penutup

Peranan Desa Karangturi dalam bidang pembinaan yaitu mehidupkan kembali semangat gotong royong antar warga masyarakat, kegiatan keagamaan dengan cara memperingati hari besar keagamaan serta melakukan pengajian rutin tiap bulannya. Pembinaan dengan pendekatan keagamaan dilakukan sejak dini melalui TK/TPA di mesjid-mesjid tiap dusun. Selain itu peranan kepala desa dalam bidang pembinaan juga dilakukan melalui kegiatan pembinaan administrasi desa, di mana kepala desa rutin memeriksa buku administrasi keuangan desa dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan agar pengeluaran telah sesuai dengan yang ditetapkan anggaran desa yang kemudian melaporkannya pada BPD. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Karangturi selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.

Peranan kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan yaitu kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan. Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa juga selalu

berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah. Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala desa adalah sebagai fasilitator dalam pembangunan. Kepala desa juga tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT.Garamedia Pustaka Utama.
- Harahap, dkk, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Balai Pustaka.
- Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta : PT Yasrif Watampone.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta.
- Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung
- Soetrisno, Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.2006
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT.Refika Pratama.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: CV.Afabeta.
- Syafei, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama
- Syarifin, Pipin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.

Widjaja, A.W, Administrasi Negara dalam kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu Telaah Administrasi).Pidato Pengukuhan,Universitas Sriwijaya, Palembang, 22 September 1994.

Widjaja, A.W.Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh. Jakarta: P T.Raja Grafindo Persada

Widjaja, A.W. 2001. Pemerintah Desa/Marga Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, A.W. 2003. Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, A.W. Otonomi Desa. Jakarta: Penerbit PT.Raja Garafindo Persada.2003